

Bangar DPRD Jabar Minta Pemda Jawa Barat Perlu Tingkatkan SPI

Bandung -Badan Anggaran (Bangar) DPRD Provinsi Jawa Barat memandang kelemahan sistem pengendalian internal merupakan penyebab utama dari permasalahan yang muncul dalam temuan BPK RI pada pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pemprov Jabar melalui diagnostic assesment terhadap SPI sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

■ NERACA

Demikian disampaikan Bangar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat (23/8) pada saat menyampaikan laporan tentang pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009.

BPK RI Perwakilan Jabar dalam sidang istimewa dengan pihak DPRD Prov. Jabar, Kamis (12/8) lalu menyampaikan LKPD Jabar 2009. Laporan yang disampaikan Auditor Utama KN V BPK RI, Achmad Syakir Amir, LKPD Prov. Jabar tahun 2009 dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian.

Dalam pembahasannya

terkait dengan Raperda tersebut, dikemukakan bahwa Bangar telah melakukan pembahasan sejak tanggal 13 Agustus 2010 melalui rapat-rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta konsultasi dengan BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

Terkait dengan laporan keuangan Pemprov Jabar Tahun 2009, dalam laporan Bangar yang disampaikan oleh Aceng Roni Syahbana, diungkapkan bahwa dalam realisasi anggaran TA 2009 Provinsi Jawa Barat terdiri dari pendapatan sebesar Rp. 7,7 triliun, sedangkan belanja sebesar Rp. 8,1 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 406,4 miliar dengan pembiayaan

netto sebesar Rp. 2,2 triliun.

Bangar juga menyampaikan bahwa terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 696,1 miliar dari anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 7,09 triliun dan realisasi sebesar Rp. 7,7 triliun.

Selanjutnya terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 1,08 triliun, selisih anggaran surplus/(defisit) dengan realisasi surplus/-(defisit) sejumlah Rp. 1,7 triliun, dan selisih anggaran pembiayaan dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 34,0 miliar.

Terkait dengan neraca per 31 Desember 2009, Bangar menyampaikan bahwa jumlah aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 17,1 triliun, jumlah kewajiban Rp. 46,2 miliar serta jumlah ekuitas dana Rp. 17,1 triliun.

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri dari saldo kas awal per 1 Januari 2009 Rp. 2,4 triliun, arus kas dari aktivitas operasi Rp. 319,1 miliar, arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp. 725,6 miliar, arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 230,7 miliar, kas Rp. 637,1 miliar, serta saldo kas akhir per 31 De-

seMBER 2009 sebesar Rp. 1,8 triliun.

Terkait dengan masalah aset yang dimiliki Pemprov Jabar, Bangar memberikan catatan agar Pemprov Jabar segera melakukan penataan dan penyelamatan khususnya terhadap aset tidak bergerak (tanah dan bangunan) melalui inventarisasi, sertifikasi dan penguasaan fisik dengan membentuk institusi khusus.

Terkait dengan kebijakan piutang, Bangar meminta agar Pemprov Jabar segera melakukan pembenahan dan penanganan/penatausahaan berkaitan dengan masalah piutang yang ada di lingkungan OPD melalui perbaikan sistem informasi data keuangan dan pembukuan dengan mengacu kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006. Selanjutnya Pemprov Jabar segera menyelesaikan piutang pada pihak ketiga melalui lembaga yang menanganinya.

Terkait persediaan/stock opname pada OPD sebagaimana yang disampaikan dalam LHP BPK, Bangar minta agar Pemprov segera melakukan stock opname persediaan di seluruh OPD, penempatan tenaga ahli persediaan barang di masing-masing OPD, dilakukan pengawasan dan pengendalian persediaan. ●nur